

**PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI JORONG
BUKIT HARAPAN NAGARI TIUMANG KABUPATEN
DHARMASRAYA**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu
Administrasi Negara sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



OLEH :

**UJANG SUHENDAR
97296/2009**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Bukit Harapan Nagari Tiuasang Kabupaten Dharmasraya.

Nama : Ujang Suhendar

NIM : 2009/97296

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 8 April 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D
NIP. 19640208 199003 2 001



Dra. Hj. Heni Candra Gustina
NIP. 19630808 198703 2 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

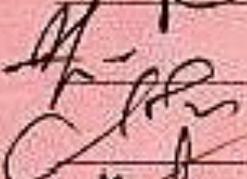
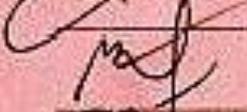
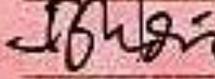
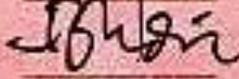
Pada Hari Selasa Tanggal 22 April 2014 Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB

Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Bukit Harapan Nagari Tiumang
Kabupaten Dharmasraya

Nama : Ujang Suhendar
NIM : 2009/97296
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 22 April 2014

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra.Hj. Firi Eriyanti, M.Pd.Ph.D	
Sekretaris	: Dra. Hj. Heni Cahda Gustina	
Anggota	: Drs. Yasril Yunus, M.Si	
Anggota	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si.Ph.D	
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP.M.Si	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syaiful Anwar, M.Pd
NIP.19621001 198903 1 002

ABSTRAK

UJANG SUHENDAR. 97296/2009. PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI JORONG BUKIT HARAPAN NAGARI TIUMANG KABUPATEN DHARMASRAYA.

Penelitian ini dilatar belakangi tidak memadainya prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, khususnya di Jorong Bukit Harapan Nagari Tiumang Kabupaten Dharmasraya. Terutama ketika memasuki musim kemarau berkepanjangan masyarakat akan mengalami kekeringan, sebaliknya ketika memasuki musim penghujan sumber air masyarakat yang berasal dari sumur galian akan menjadi keruh dan tidak layak konsumsi. Dalam upaya pemenuhan layanan air minum secara nasional pemerintah menyediakan program bantuan kepada daerah yang mengalami kesulitan memperoleh akses air bersih. Program PAMSIMAS dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program PAMSIMAS di Jorong Bukit Harapan Nagari Tiumang Kabupaten Dharmasraya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Jorong Bukit Harapan Nagari Tiumang Kabupaten Dharmasraya. Dalam pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Jenis data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dapat dikelompokkan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa program PAMSIMAS yang dilaksanakan di Jorong Bukit Harapan belum dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Kendala utamanya karena sumber air sumur bor yang dihasilkan berwarna keruh. Dari tiga titik kontruksi sarana air minum yang dibangun, hanya satu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal itu juga berdampak pada pengelolaan dan pemeliharaan sarana program PAMSIMAS, karena hanya beberapa warga saja yang memanfaatkan program tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Bukit Harapan Nagari Tiumbang Kabupaten Dharmasraya”. Salawat dan Salam penulis haturkan kepada nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana strata satu (S1) dengan gelar Sarjana Administrasi Publik pada jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang.
2. Bapak M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D dan Ibu Henni Muchtar, SH.MH selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik.
3. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Ibu Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dra. Hj. Heni Candra Gustina selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si, M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D, Adil Mubarak, S.IP. M.Si selaku Penguji yang telah berkenan meluangkan waktu disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik, saran dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.
8. Bapak Junaidi Selaku Tim Pelaksana kegiatan program PAMSIMAS yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.
9. Bapak Nur Rohman dan Syafrizal selaku anggota BP-SPAMS Jorong Bukit Harapan serta pihak-pihak lainnya yang telah bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Teristimewa untuk kedua Orang Tua yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis secara moral maupun material serta do'a untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan terutama bagi rekan-rekan IAN 2009 yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, bantuan, masukan, kritikan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kelemahan dari penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua.

Padang, April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan, Rumusan Masalah.....	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Pembatasan Masalah.....	8
3. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian teoritis.....	10
1. Konsep Implementasi Kebijakan.....	10
2. Program PAMSIMAS.....	17
B. Kerangka Konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Informan Penelitian	27
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	29
1. Jenis dan Sumber Data	29
2. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3. Alat Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Uji Keabsahan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	36
1. Gambaran Umum Nagari Tiumang.....	36
2. Organisasi Pengelola Kegiatan program PAMSIMAS.....	37
B. Temuan Khusus.....	46
1. Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Bukit Harapan..	46
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Bukit Harapan.....	57
3. Upaya untuk mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Bukit Harapan.....	62
C. Pembahasan.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama Informan Penelitian.....	28
Tabel 3.2 Jenis, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gambar Kran Umum Air Program PAMSIMAS.....	61
Gambar 4.2 Bak Penampungan Air PAMSIMAS.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era Otonomi Daerah saat ini menuntut pemerintah daerah memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di semua sektor pembangunan. Salah satu bentuk pelayanan dasar yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten/kota adalah penyediaan kebutuhan air minum dan sanitasi yang sangat berkaitan erat dengan kondisi kesehatan masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena disamping kesadaran masyarakat akan hidup sehat masih diragukan, sarana untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat pun dirasa masih sangat terbatas.

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah bertanggungjawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi. Namun demikian, bagi daerah-daerah dengan wilayah pedesaan relatif luas, berpenduduk miskin relatif tinggi dan mempunyai kapasitas fiskal rendah, pada umumnya kemampuan mereka sangat terbatas, sehingga memerlukan dukungan finansial untuk membiayai

investasi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanannya kepada masyarakat, baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik yang terdiri dari manajemen, teknis dan pengembangan sumber daya manusia.

Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, khususnya di pedesaan dan daerah pinggiran kota berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang baik akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air minum dan sanitasi yang baik. Ketiga dampak tersebut akan memberikan dampak lanjutan berupa peningkatan produktivitas masyarakat. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah telah mencanangkan suatu program yang berlandaskan kepada konsep pemberdayaan.

Pada awalnya, pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi banyak dilakukan oleh pemerintah pusat, namun demikian sejalan dengan upaya pelaksanaan desentralisasi dan perkembangan sosial politik dalam negeri, maka penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah. Dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kewenangan wajib tersebut lebih ditegaskan lagi dan dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dapat memfasilitasi atau membantu

pengembangan SPAM khususnya dalam rangka pengamanan (*safeguard*) pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Dalam upaya pemenuhan layanan air minum secara nasional Pemerintah Pusat menyediakan perangkat kebijakan dan arahan serta program/proyek pembantuan kepada daerah dalam upaya mendorong percepatan capaian oleh masing-masing daerah. Kebijakan dalam upaya percepatan layanan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menegaskan setiap daerah harus memiliki strategi pembangunan air minum. Di sisi lain, sebagian besar tanggungjawab penyediaan air minum berada pada pemerintah daerah.

Program PAMSIMAS merupakan salah satu program pemerintah (pusat dan daerah) untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Ruang lingkup kegiatan program Pamsimas mencakup 5 (lima) komponen kegiatan: 1) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal; 2) Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan Pelayanan Sanitasi; 3) Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum; 4) Insentif Desa/kelurahan dan Kabupaten/kota; dan 5) Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek. (Kementrian PU, 2012 : 11-22).

Program penyediaan air dan sanitasi berbasis masyarakat ini sangat diperlukan oleh masyarakat desa karena masyarakat dapat memperoleh air yang bersih yang dapat digunakan untuk minum, cuci, dan mandi. Selain itu, kesehatan lingkungan dapat terwujud karena masyarakat desa diajarkan untuk tidak lagi buang air besar disembarang tempat namun sudah di jamban umum atau di rumah mereka masing-masing. Peran serta masyarakat melalui program PAMSIMAS dalam meningkatkan kesehatan dan kebersihan lingkungan desa ini menjadi hal yang penting dan utama sebagai keberhasilan program dan upaya pengelolaan lingkungan.

Program PAMSIMAS dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain.) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*) (Kementrian PU, 2012 : 1). Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.

Kabupaten Dharmasraya salah satu kabupaten di Sumatera Barat terletak di ujung tenggara Sumatera Barat antara 00 47' 7" LS – 10 41' 56" LS & 1010 9' 21" BT – 1010 54' 27" BT. Kondisi dan topografi Kabupaten Dharmasraya mayoritas merupakan lahan datar dengan

ketinggian dari 82 meter sampai 1.525 meter dari permukaan laut. Menurut Perda No. 4 Tahun 2009 luas wilayah Kabupaten Dharmasraya mencapai 2.961,13 Km² dan terbagi menjadi 11 kecamatan dan 52 nagari (Badan Pusat Statistik Kab. Dharmasraya).

Jorong Bukit Harapan merupakan salah satu daerah di Kabupaten Dharmasraya tepatnya di Kenagarian Tiumang, Kecamatan Tiumang yang jumlah penduduknya 767 jiwa, terdiri dari 400 orang laki-laki dan 367 orang perempuan (BPS Kab. Dharmasraya, Tiumang dalam angka 2012). Daerah ini merupakan daerah Transmigrasi sehingga penduduk didaerah ini merupakan mayoritas para pendatang yang berasal dari pulau jawa, pekerjaan para penduduknya adalah petani. Daerah ini dapat dikatakan daerah pedalaman, karena letaknya jauh dari pusat pemerintahan dan melewati perkebunan kelapa sawit dimana akses jalannya yang masih tanah dan berbatu.

Masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk dikonsumsi dapat dikatakan belum sejahtera, karena masyarakat masih menggunakan air dari sumur galian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakatpun mengeluhkan ketika memasuki musim kemarau berkepanjangan maka masyarakat setempat akan mengalami kekeringan, sebaliknya ketika memasuki musim hujan air dari sumur galian mereka akan menjadi keruh dan berbau sehingga masyarakat kesulitan untuk memperoleh air bersih. Serta jauhnya pemukiman dari pusat kota sehingga

masyarakat yang hendak membeli air ke depot air minum pun menjadi kendala dalam memperoleh air untuk dikonsumsi.

Akhirnya pada Tahun 2012 pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya melaksanakan program PAMSIMAS yang salah satunya dilaksanakan di Jorong Bukit Harapan Nagari Tiumbang Kabupaten Dharmasraya. Program PAMSIMAS yang dilaksanakan di Jorong Bukit Harapan, Nagari Tiumbang, Kabupaten Dharmasraya ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan diwujudkan dengan pembangunan sistem pelayanan sumber air tanah dalam/sumur dalam (bor), sistem pelayanan sumber air tanah dalam/menara air, dan sistem pelayanan sumber air tanah dalam bentuk perpipaan, serta sarana cuci tangan di Sekolah Dasar, yang disesuaikan dengan kondisi topografi daerah yang dipilih. Setelah program selesai dilaksanakan, ternyata tidak semua masyarakat memahami tentang program tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkannya dan masih menggunakan sumur galian. Selain itu ada air yang dihasilkan dari sumur bor itu berwarna keruh dan tidak layak konsumsi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Cendesri salah satu pengurus program PAMSIMAS Jorong Bukit Harapan yang mengatakan:

“pada dasarnya unit kerja teknis sarana air PAMSIMAS di Jorong Bukit Harapan, didalam pelaksanaan dan pengelolaannya tidak berhasil karena terjadi kesalahan didalam proses pembangunan sarana air PAMSIMAS yaitu kesalahan pada penetapan sumber air program yang tidak dilakukan dengan uji kelayakan dan kesehatan sehingga membuat kualitas air yang dihasilkan tidak sesuai kualitas konsumsi (air berwarna keruh). Penetapan sumber air yang dirasakan tidak

melibatkan masyarakat, serta terbatas oleh pelaksanaan jangka waktu penyelesaian membuat terganggunya pencapaian penyediaan air minum. Bahkan untuk perluasan jaringan akses air masyarakat tidak terlaksana hingga saat ini”. (wawancara tanggal 25 April 2014)

Memperhatikan pengantar di atas maka kedudukan evaluasi pengelolaan program sangat penting guna menentukan tingkat perkembangan sebagai sarana belajar warga masyarakat. Kondisi tersebut mendorong penulis ingin mengkaji masalah ini dengan judul:

“Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Bukit Harapan Nagari Tiumbang Kabupaten Dharmasraya.”

B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah, sebagai berikut :

- a. Masyarakat masih kesulitan memperoleh air bersih ketika memasuki musim kemarau dan musim hujan.
- b. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program PAMSIMAS.
- c. Belum tercapai tujuan program PAMSIMAS yaitu meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan.

- d. Air yang dihasilkan masih belum sesuai standar yang ditentukan karena masih keruh.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Bukit Harapan Nagari Tiumbang Kabupaten Dharmasraya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Bukit Harapan?
- b. Apakah kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Bukit Harapan?
- c. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Bukit Harapan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Bukit Harapan?
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Bukit Harapan?
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Bukit Harapan?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan kebijakan publik.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dalam melaksanakan tugas di lapangan.

- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Sebelum kita membahas tentang kebijakan publik, kita harus memahami terlebih dahulu tentang kebijakan. Menurut Harbani Pasolong (2007:38) kebijakan adalah suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

Kebijakan publik menurut Chaizi Nasucha (dalam Harbani Pasolong, 2007:39) adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Selaras dengan pernyataan di atas Thomas R. Dye dalam Harbani Pasolong (2007:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah semata.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam suatu kebijakan, perlu dilakukan analisa mengenai kebijakan yang dilaksanakan. Menurut Urban Institute (dalam Nanang Fattah, 2012:179) dalam menganalisa kebijakan perlu dilakukan:

- a. Merumuskan masalah.
- b. Mengidentifikasi tujuan yang relevan.
- c. Memilih kriteria evaluasi.
- d. Spesialisasi layanan kelompok.
- e. Mengidentifikasi alternatif.
- f. Memperkirakan biaya dari alternatif yang ada.
- g. Menetapkan tingkat efektivitas dari setiap alternatif.
- h. Membuat kesimpulan dan menetapkan keputusan.

Menurut Nanang Fattah (2012:234) dalam menghasilkan suatu kebijakan, diperlukannya kriteria-kriteria dalam penetapan suatu kebijakan itu sendiri yaitu:

- a. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharap, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
- b. Efisiensi (efisiensi) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektivitas tertentu.

- c. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkatan efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- d. Kesamaan yaitu kebijakan yang akibatnya atau usahanya didistribusikan secara adil.
- e. Responsivitas yaitu sejauh mana kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tersebut.
- f. Ketetapan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Dengan berbagai kriteria yang dijabarkan diatas, alasan diperlukannya penetapan kriteria adalah karena kriteria yang digunakan akan lebih spesifik yang berkaitan dengan apakah program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jauh lagi, kriteria berkaitan dengan program untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Menurut Riant Nugroho D (2003:75-76), seperti diketahui dalam masyarakat terdapat tiga jenis pokok yang diperlukan agar masyarakat hidup, tumbuh, dan berkembang yaitu:

- a. Tugas pelayanan (publik) adalah tugas memberikan pelayanan kepada umum tanpa membedakan-bedakan dan diberikan secara cuma-cuma atau dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok tidak mampu dapat menjangkaunya.
- b. Tugas Pembangunan adalah tugas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat. tugas ini fokus kepada upaya membangun

produktivitas dari masyarakat dan mengkreasikan nilai ekonomi atas produktivitas ekonomi tersebut.

- c. Tugas pemberdayaan adalah peran untuk membuat setiap warga masyarakat mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Dalam perencanaan perumusan kebijakan publik, yang harus diwujudkan menurut Lijan (2006:40) adalah perlunya kemampuan dalam menggabungkan semua segmen kebijakan publik dengan tahap-tahap:

- a. Perumusan masalah, untuk menemukan asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebab, memetakan tujuan, memadukan pandangan yang bertentangan, dan merancang kebijakan yang baru.
- b. Peramalan, menguji masa depan yang potensial dan bernilai, mengistemasi akibat kebijakan yang ada atau diusulkan, kendala yang akan dihadapi serta kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan.
- c. Rekomendasi, membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, eksternalisasi dan akibat ganda, menentukan criteria pembuatan pilihan, menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan..
- d. Pemantauan, membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, identifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

Metode yang dijabarkan tentang perumusan kebijakan publik diatas digunakan sebagai suatu proses dalam dalam melakukan penyelidikan atau untuk pencarian solusi. Untuk itu diperlukannya pemahaman dan belajar dari pengalamann yang sebelumnya dalam memecahkan masalah. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukannya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang berguna bagi pembangunan.

Keberhasilan implentasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variable atau faktor-faktor yang masing-masing variabel tersebut saling erhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III yang dikutip dalam bukau Subarsono (2006;90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para implementer akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang

akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi, yaitu:

1). Kejelasan informasi

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

2). Konsistensi Informasi yang disampaikan

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif, tanpa sumberdaya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumen saja. Sumberdaya meliputi empat komponen, yaitu:

1). Staff yang cukup (jumlah dan mutu)

- 2). Informasi yang dibutuhkan
- 3). Authority, yaitu kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas tanggungjawab
- 4). Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standart Operating Procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Pada setiap program yang telah ditetapkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mengalami adanya keterbatasan dalam kegiatan operasionalnya sebagai suatu sumber daya yang terbatas atau dapat disebut juga masalah atau kendala.

Menurut Dunn (dalam Nanang Fattah, 2012:27) ada 3 kelas masalah kebijakan, yaitu:

- a. Masalah sederhana (*Well-Structured*) adalah masalah yang melibatkan satu atau beberapa pembuat keputusan dan seperangkat kecil alternatif-alternatif kebijakan yang berguna untuk mencerminkan tujuan jangka pendek yang diurutkan dalam tatanan pemilihan pembuatan keputusan.
- b. Masalah yang agak sederhana (*Moderately Structured Problems*) masalah yang melibatkan satu atau beberapa pembuat keputusan dan sejumlah alternatif yang secara relatif terbatas.
- c. Masalah yang rumit (*Ill-Structured*) adalah masalah-masalah yang mengikutsertakan banyak pembuat keputusan yang kegunaan (nilai) tidak diketahui atau tidak memungkinkan untuk diurutkan secara konsisten.

2. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Program PAMSIMAS merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

a. Pengertian Program PAMSIMAS

Pamsimas adalah kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dananya berasal dari kontribusi masyarakat,

pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Bank Dunia. Kegiatan ini didukung oleh Departemen Pekerjaan Umum sebagai *executing agency* bersama dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kesehatan. (*Kementrian PU, 2012 : 11*).

b. Tujuan Program PAMSIMAS

Program PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota. Secara lebih rinci Program PAMSIMAS bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan praktek hidup bersih dan sehat di masyarakat;
- 2) Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
- 4) Meningkatkan efektivitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

c. Ruang Lingkup Kegiatan Program PAMSIMAS

Ruang lingkup kegiatan program Pamsimas terdiri atas 5 (lima) komponen, dengan rincian sebagai berikut: (*Kementrian PU, 2012 :13-22*)

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal;

- a) Dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kegiatan advokasi bagi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/ kelurahan) dan masyarakat untuk meningkatkan layanan air minum dan sanitasi, termasuk upaya peningkatan alokasi anggaran penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dan mendorong munculnya inovasi kesinambungan pengelolaan dan operasional layanan pasca konstruksi dalam jangka panjang.
- b) Pengembangan program pelatihan bagi Fasilitator Masyarakat dalam melakukan pendampingan dalam pembuatan RKM di tingkat masyarakat; mengembangkan program pelatihan (kesehatan, community development / social inclusion, dan teknis penyediaan air minum dan sanitasi) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung proses CDD (community driven development) dan pendampingan Fasilitator Masyarakat; dan pengarusutamaan (mainstreaming) pendekatan CDD untuk pengembangan pemberian layanan air minum dan sanitasi; serta penguatan manajemen program kepada unit manajemen dan pelaksana proyek, tim koordinasi proyek, tim evaluasi RKM (Rencana Kerja Masyarakat); pengembangan pedoman/petunjuk, manual dan pelatihan untuk penguatan manajemen proyek dan peran pemerintah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan) dalam pengelolaan dan operasional pasca konstruksi.

2) Peningkatan Kesehatan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Layanan Sanitasi;

- a) Dukungan pelaksanaan program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
- b) Program marketing sanitasi (menciptakan permintaan dan menguatkan pasar lokal dalam merespon permintaan improved sanitation), promosi perilaku hidup bersih dan sehat
- c) Peningkatan sanitasi dan kesehatan di sekolah
- d) Promosi kebersihan dan kesehatan lingkungan serta monitoring target pemberian layanan air minum dan sanitasi MDGs kabupaten/kota

3) Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum;

Penyiapan dan implementasi pembangunan sarana air minum dan sanitasi umum di masyarakat dan sekolah, terdiri dari pembangunan sarana air minum yang improved untuk wilayah perdesaan atau sarana sanitasi komunal yang improved untuk wilayah peri-urban, dan sarana sanitasi sekolah.

4) Insentif Desa/Kelurahan dan Kabupaten/Kota;

Insentif terhadap inovasi dalam pengarusutamaan dan perluasan/replikasi program Pamsimas oleh desa/kelurahan dan kabupaten/kota dengan orientasi pengembangan kegiatan ekonomi produktif berbasis air. Kriteria kompetisi antar masyarakat desa/kelurahan meliputi : pencapaian open defecation free (ODF);

pencapaian sanitasi total dengan 100% rumah tangga mengadopsi cuci tangan dengan sabun; penggunaan sanitasi yang improved, dan praktik perilaku hidup bersih dan sehat lainnya; sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun bermanfaat 100% bagi rumah tangga lemah/miskin di masyarakat; kesetaraan partisipasi antara perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin; kepuasan pengguna terhadap layanan sarana air minum dan sanitasi; dan kecukupan lebih dari 100% biaya O&M dari tarif pengguna, memiliki program promosi sanitasi dan kesehatan sekolah yang melibatkan orang tua wali murid, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk kriteria kompetisi antar kabupaten/kota di tambah intensitas dan ekstensitas replikasi Pamsimas di wilayahnya.

- 5) Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek.
 - a) Central Management Advisory Consultant - CMAC (Konsultan Advitori Manajemen Pusat)
 - b) Provincial and District Management Consultants – PMAC (Konsultan Advitori Manajemen Provinsi dan Kabupaten/kota)
 - c) Individual Consultant (Konsultan Kabupaten/kota, dan Tim Fasilitasi Masyarakat)
 - d) Independent Impact Evaluation Consultant (Konsultan Independen Evaluasi Dampak).

d. Pendekatan Program PAMSIMAS

Prinsip pendekatan pelaksanaan Program PAMSIMAS adalah sebagai berikut:

1) Berbasis masyarakat

Seluruh proses perencanaan kegiatan PAMSIMAS seperti pemilihan kebutuhan air dan pelaksanaan kegiatan menyertakan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat tidak terkecuali kaum perempuan. Hal ini sebagai pengejawantahan atas pemenuhan kebutuhan masyarakat atas layanan air minum dan sanitasi, sehingga diharapkan sarana dan prasarana yang terbangun dipelihara dan dikelola secara berkesinambungan oleh masyarakat.

2) Kemitraan

Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan kegiatan PAMSIMAS, dalam hal ini pemerintah berperan sebagai fasilitator.

3) Partisipatif

Artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam seluruh kegiatan PAMSIMAS mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.

4) Transparansi

Penyelenggaraan kegiatan PAMSIMAS dilakukan bersama dengan masyarakat dan seluruh kegiatan dapat diakses data/informasinya melalui media oleh masyarakat dan seluruh *stakeholder*.

5) Tanggap kebutuhan

Penyelenggaraan kegiatan PAMSIMAS berdasarkan kebutuhan masyarakat akan layanan air minum, sanitasi, dan kesehatan, dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan pilihan dan hak bersuara dalam keseluruhan tahapan kegiatan PAMSIMAS.

6) *Reward and development*

Artinya dana hibah PAMSIMAS merupakan *reward* dan sekaligus sebagai upaya untuk *mendevolop* kesadaran masyarakat dalam memprioritaskan kepentingan bersama dan keberpihakan pada masyarakat miskin dan orang-orang rentan dan terisolasi (IVP) dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan layanan air minum dan sanitasi lingkungan serta praktek hidup bersih dan sehat.

7) Tepat mutu

Artinya pembangunan yang berkualitas. Semua fasilitas yang dibangun harus memenuhi rancangan/disain dan standar teknik yang ditetapkan, dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas.

8) Kestinambungan dan keberlanjutan sarana

Sarana yang dibangun dapat menyediakan air bersih secara kontinyu dengan kualitas yang dapat diterima (baik dari sudut pandang pengguna maupun pemerintah) dan memenuhi kebutuhan kuantitas

domestik, serta masyarakat turut serta memelihara sarana tersebut agar tetap berfungsi.

9) Keberpihakan pada masyarakat miskin

Artinya orientasi kegiatan dalam proses maupun pemanfaatan berguna bagi masyarakat miskin.

10) Kesetaraan gender

Artinya program PAMSIMAS memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan, seperti halnya laki-laki, untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan/pengelolaan kegiatan di masyarakat.

11) Dapat dipertanggung-jawabkan

Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hal tepat sasaran, tepat waktu, tepat pembiayaan dan ketepatan mutu pekerjaan.

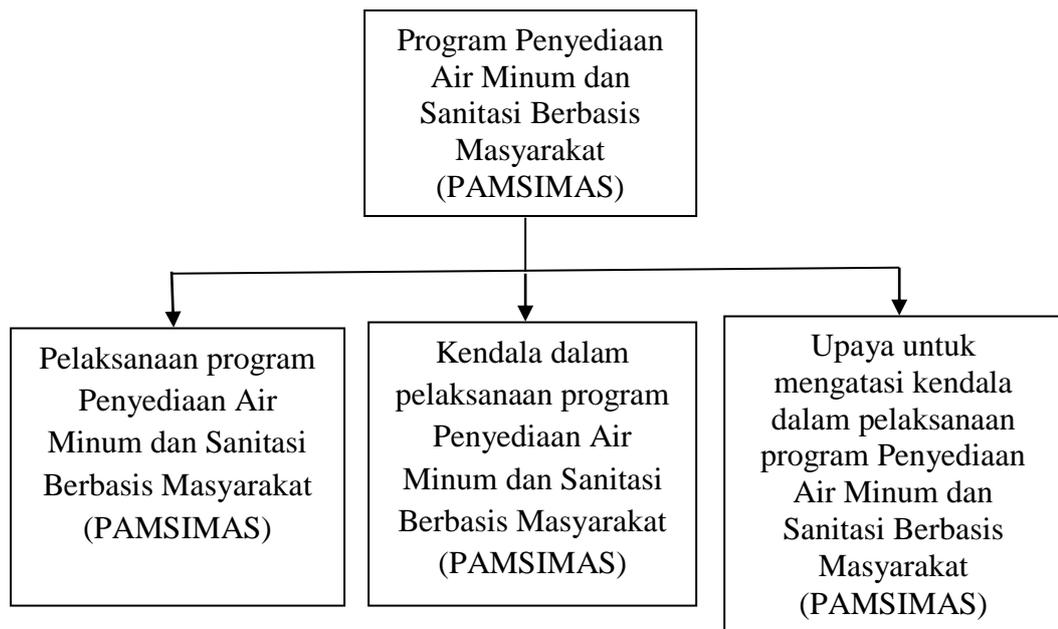
e. Landasan Hukum Program PAMSIMAS

Landasan hukum program PAMSIMAS :

- 1) UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- 2) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) PP No.16 tahun 2005 Pengembangan Sistem Persediaan Air Minum.
- 4) Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2003.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan hubungan konsep yang akan diteliti. Berangkat dari latar belakang masalah dan kajian teoritis maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Bagan 2.1 Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan kepada pihak pengelola program dan penerima manfaat program PAMSIMAS Jorong Bukit Harapan Nagari Tiumang Kabupaten Dharmasraya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong bukit Harapan Nagari Tiumang Kabupaten Dharmasraya telah selesai dilaksanakan, namun hasilnya belum dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat Jorong Bukit Harapan secara keseluruhan. Pelaksanaan kegiatan program PAMSIMAS Jorong Bukit Harapan diimplementasikan dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM I) yaitu pelatihan ditingkat masyarakat dan pembangunan kontruksi sarana air minum dan sarana sanitasi umum, Implementasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM II) terdiri dari Pelatihan tentang prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan pelaksanaan PHBS dimasyarakat dan sekolah.
2. Kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Bukit Harapan Nagari Tiumang ialah masyarakat yang masih ragu dan pesimis dalam menerima program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, Kendala selanjutnya dalam pelaksanaan program program PAMSIMAS yaitu air yang dihasilkan tidak layak konsumsi

oleh masyarakat, yang pada akhirnya membuat sarana tidak pernah dipakai serta tidak terawat oleh masyarakat. Kendala yang terakhir ialah masih banyaknya masyarakat yang belum memanfaatkan air pamsimas sehingga dalam mengumpulkan dana iuran/swadaya masyarakat hanya seadanya, sehingga belum dapat memenuhi untuk biaya operasional dan pemeliharaan sarana.

3. Untuk mengatasi kendala yang terjadi pada pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Bukit Harapan Nagari Tiumang, upaya yang sudah dilakukan diantaranya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap musyawarah yang dilaksanakan, adapun upaya dalam mengatasi kualitas air dari sumur bor yang berwarna keruh tim pelaksana mensiasatinya dengan membuat sumur galian, selanjutnya upaya dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam hal pemeliharaan sarana program pamsimas, diberlakukanya iuran wajib pemakai air pamsimas bagi masyarakat yang memanfaatkan program PAMSIMAS tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan program, maka antara petugas-petugas pelaksana kegiatan harus menjalin suatu komunikasi yang

efektif dan dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan program PAMSIMAS.

2. Dalam menetapkan usulan kegiatan yang akan didanai pada masa yang akan datang, sebaiknya masyarakat dapat lebih aktif dalam memberikan ide-ide dan gagasan-gagasan agar masyarakat dapat mengetahui apa-apa saja yang mereka butuhkan dalam meningkatkan taraf kehidupan hidupnya.
3. Sosialisai program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) oleh Pemerintah atau Tim Fasilitator lebih ditingkatkan agar masyarakat lebih mengerti apa dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitri. 2011. *Community Development teori dan aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Burhan Bungin. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Edi Soeharto. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Harbani Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial : Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta : Gp Press
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2012. *Pedoman Pengelolaan Program PANSIMAS*. Jakarta : CPMU PANSIMAS.
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Lijan Poltak Sinambela, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhamad Nasir. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Nanang Fattah. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Nurul Zuriah. 2009. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Oos M. Anwas. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Riant Nugroho D. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Soerjono. 1999. *Pemberdayaan Sumber Daya*. Jakarta: LAN.
- Sondang P. Siagian. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2008. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat : merangkai sebuah kerangka*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, Tiumang dalam angka 2013. (online) <http://dharmasrayakab.bps.go.id>, diakses 12 September 2013.

Pedoman Pengelolaan Program PAMSIAMS Tingkat Masyarakat.2012 .(online) ”<http://www.new.pamsimas.org>”, diakses 20 Oktober 2013.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PAMSIMAS Tingkat Masyarakat. 2012. (online) ”<http://www.new.pamsimas.org>”, diakses 5 januari 2014.